

Komparasi tentang Manajemen Satuan Pendidikan di Negara Selandia Baru

Abdul Fajar¹, Roudhotul Jannah², Cecep Hilman³

^{1,2}Mahasiswa Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia

³Dosen Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia

E-mail: abdulfajarfaqot@gmail.com, roudhotuljannah@gmail.com, cecephilman77@gmail.com

Article History: Received: 2022-10-22 || Revised: 2022-11-26 || Published: 2022-12-29

Sejarah Artikel : Diterima: 2022-10-22 || Direvisi: 2022-11-26 || Dipublikasi: 2022-12-29

Abstract

In this millennial era, education occupies a very important position in human development. The quality of the Finnish education system is interesting to study because its success has been recognized worldwide. This study provides an overview of the comparison of the education systems of Indonesia and Finland. Literature review is the method used in this research. The Comparative Study to New Zealand was conducted by the Director General of GTK from October 16 to November 2017 in order to implement Presidential Instruction No. 9 of 2016 concerning the revitalization of vocational schools, by developing human resources for productive educators to be more competent, skilled and able to create networks, especially best teaching practices.

Keywords: *Comparison of Education Management in New Iceland.*

Abstrak

Di era milenial seperti saat ini Pendidikan menempati posisi yang sangat penting dalam perkembangan manusia. Kualitas system Pendidikan Finlandia menarik menjadi kajian karena keberhasilannya telah diakui dunia. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perbandingan sistem Pendidikan Negara Indonesia dan Finlandia. Kaian Kepustakaan adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Studi Komparasi ke Selandia Baru dilakukan oleh Direktur Jendral GTK pada 16 Oktober hingga November 2017 dalam rangka mengimplementasikan Inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah kejuruan, dengan mengembangkan sumber daya manusia pendidik bidang produktif agar lebih kompeten, terampil dan dapat membuat jejaring terutama praktik pengajaran terbaik.

Kata kunci: *Komparasi Manajemen Pendidikan di Islandia Baru.*

I. PENDAHULUAN

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia mengandung amanat perlunya peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia (SDM) di Sekolah Menengah Kejuruan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang antara lain meliputi program peningkatan kompetensi guru pembelajar, sertifikasi guru, program keahlian ganda serta berbagai pelatihan lain baik di dalam maupun di luar negeri. Pengiriman guru untuk belajar di luar negeri dirasa penting, terutama untuk guru kejuruan mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga guru Indonesia tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi. Selain itu, dengan belajar di luar negeri, guru-guru akan bisa memahami budaya serta nilai-nilai positif yang dianut di negara maju yang diharapkan nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta bisa ditularkan kepada peserta didik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama

Luar Negeri mengirimkan guru SMK untuk mengikuti pelatihan di Auckland, Selandia Baru. Bidang Pelatihan yang diikuti meliputi bidang pertanian, energi terbarukan, pariwisata, industri kreatif, konstruksi dan kemaritiman. Ada tiga tujuan studi komparasi ke Selandia Baru: pertama, mengembangkan keterampilan peserta sesuai dengan bidang keahliannya, kedua, memahami kebijakan pendidikan dan manajemen di lembaga pendidikan kejuruan di Selandia Baru, ketiga, menemukan praktik terbaik dari pengembangan pendidikan kejuruan di Selandia Baru. Dalam pelaksanaannya 8 standart yang meliputi: 1) standart isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana prasarana; 6) standart pengelolaan; 7) standart pembiayaan pendidikan; dan 8) standar evaluasi/pendidikan tersebut diikuti dengan diterbitkannya beberapa Permendiknas dan Peraturan Menteri Agama (PMA). Kegiatan evaluasi semestinya dilakukan mengacu pada landasan undang-undang serta menyeluruh meliputi 8 standart yang telah dirumuskan BSNP, namun dalam makalah ini penulis akan membatasi pembahasan evaluasi pendidikan Islam pada 2 aspek yang seringkali menjadi isu sentral dan hangat. Kedua aspek yang menjadi fokus makalah ini adalah aspek kinerja guru dan proses pembelajaran.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan studi literatur sebagai pendekatan penelitiannya. Dengan mempelajari berbagai artikel seputar partisipasi yang dilakukan sekolah, masyarakat, pemerintah dalam Pendidikan. Data diperoleh dari kajian pustaka dan observasi dari pengalaman penulis sehingga terlahirlah kesimpulan kesimpulan yang akan dijabarkan dalam pembahasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Pendidikan di Indonesia

Indonesia telah mengatur semua bentuk aktivitas Pendidikan nasional melalui peraturan perundang-undangan. UUD 1945 dalam alinea ke 4 mengamanahkan agar Pendidikan Indonesia harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi anak bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara terperinci UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjabarkan secara rapi serta sistematis mengenai sistem Pendidikan Indonesia. Penjabaran mengenai prinsip-prinsip Pendidikan di Indonesia tertuang dalam pasal 4 ayat 1 hingga 6. Dalam penelitian Ristianti (2019) menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia sedang berkembang dari era revolusi industri 4.0 menjadi social education 5.0 didalamnya mengisyaratkan agar penerapan Pendidikan harus dilakukan dengan demokratis serta berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa (Parker & Raihani, 2011). Selanjutnya UU SISDIKNAS pasal 5 ayat 1 mengamanatkan bahwa semua orang memiliki hak untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas baik. Amanah tersebut seperti sangat bertentangan dengan amanah undang- undang SISDIKNAS pasal 5 ayat 2 hingga 4, yang menyatakan bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial atau tinggal didaerah terpencil atau terkebelakang, masyarakat adat yang terpencil, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan (2003). Sistem pendidikan saat ini seolah-olah merupakan salah satu bentuk dari amanah pasal tersebut, dimana Lembaga Pendidikan nasional begitu antusias untuk melakukan kompetisi. Pemilahan siswa yang memiliki potensi dan kecerdasan diatas rata-rata dengan siswa yang memiliki potensi kecerdasan dibawah rata-rata menjadi salah satu bukti yang tersirat.

B. Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan di Indonesia

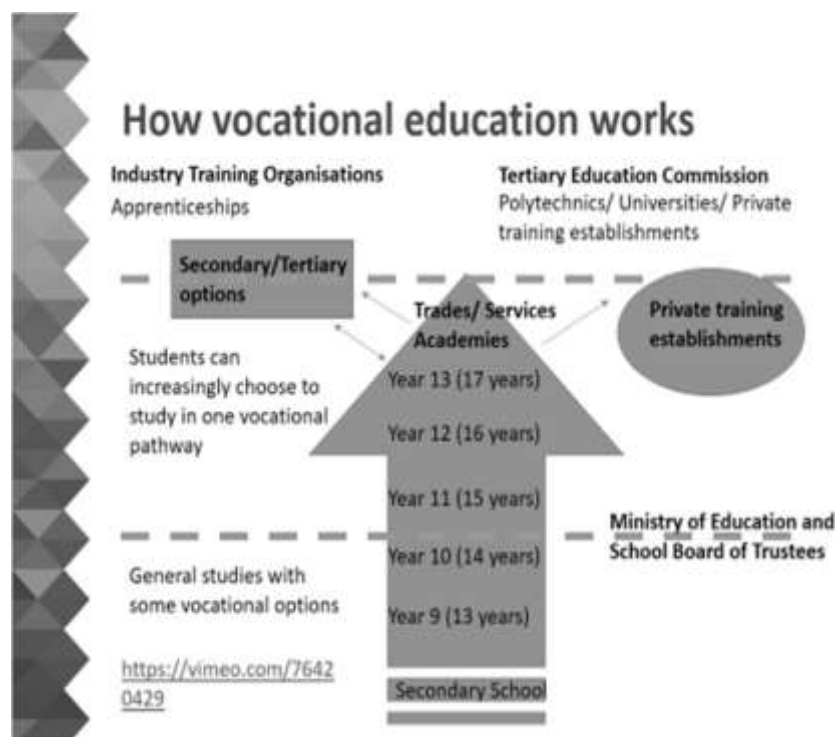
Kualitas pendidikan suatu bangsa mempunyai kaitan yang erat dengan kualitas tenaga pendidik atau guru. Di Indonesia begitu banyak sekolah tinggi keguruan dan universitas yang menyediakan tempat bagi para mahasiswa calon guru untuk mendalami keilmuan yang digelutinya. Mengacu pada UU SISDIKNAS pasal 39 ayat 2 Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai perencana serta pelaksana kegiatan pembelajaran, penilai hasil pembelajaran, pelaksana pembimbingan serta pelatihan, dan melaksanakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk pendidik pada pendidikan tinggi. Semua perguruan tinggi penghasil lulusan yang nantinya berprofesi guru diharapkan mampu

memberikan berbagai pelatihan berkaitan kompetensi yang telah disebutkan. Selanjutnya pada pasal 40 ayat 2 poin a bahwa guru dituntut untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang inovatif dan kreatif. Untuk menunjang tuntutan ini, hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia mewajibkan mahasiswa keguruannya untuk melaksanakan kegiatan lapangan, dalam hal ini melakukan simulasi pembelajaran. Selain itu kegiatan penelitian diwajibkan pada mahasiswa calon guru yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Kualitas pendidikan suatu bangsa mempunyai kaitan yang erat dengan kualitas tenaga pendidik atau guru. Di Indonesia begitu banyak sekolah tinggi keguruan dan universitas yang menyediakan tempat bagi para mahasiswa calon guru untuk mendalami keilmuan yang digelutinya. Mengacu pada UU SISDIKNAS pasal 39 ayat 2 Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai perencana serta pelaksana kegiatan pembelajaran, penilai hasil pembelajaran, pelaksana pembimbingan serta pelatihan, dan melaksanakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk pendidik pada pendidikan tinggi.

Semua perguruan tinggi penghasil lulusan yang nantinya berprofesi guru diharapkan mampu memberikan berbagai pelatihan berkaitan kompetensi yang telah disebutkan. Selanjutnya pada pasal 40 ayat 2 poin a bahwa guru dituntut untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang inovatif dan kreatif. Untuk menunjang tuntutan ini, hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia mewajibkan mahasiswa keguruannya untuk melaksanakan kegiatan lapangan, dalam hal ini melakukan simulasi pembelajaran. Selain itu kegiatan penelitian diwajibkan pada mahasiswa calon guru yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah.

1. Sistem pendidikan di Islandia Baru

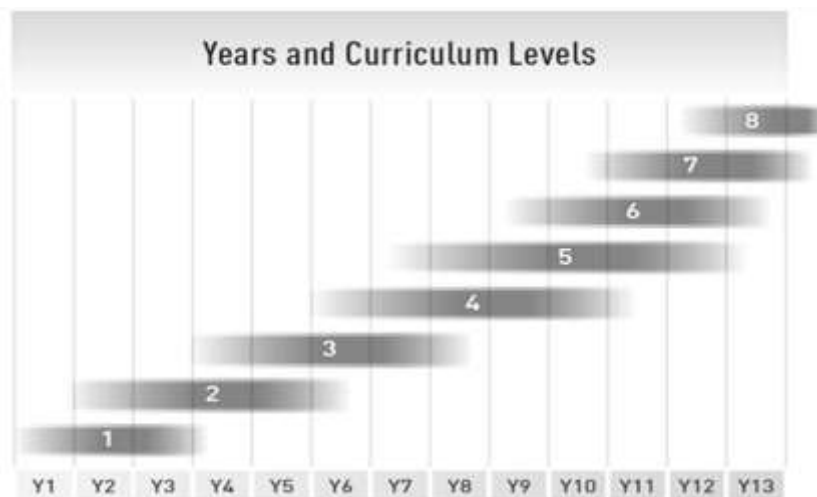
Pendidikan menengah di Selandia baru berbeda dengan di Indonesia, khususnya vokasional untuk di Selandia baru ditempuh selama lima tahun, kalau di Indonesia 3-4 Tahun yakni mulai year 9 (umur 13 tahun), year 10 (14 tahun) disebut Junior School, year 11 (15 tahun), year 12 (16 tahun), year 13 (17 tahun) disebut senior vokasional (Gambar 1).



Gambar 1. Vocational Education Works

Pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru berlangsung dari Tahun 1 sampai dengan Tahun 13 yang dibagi ke dalam 8 Level Kurikulum meliputi: Tahun 1 dan 2 disebut Level 1,

Tahun 2 s.d 5: Level 2, Tahun 4 s.d 7 : Level 3, Tahun 6 s.d 10: Level 4, Tahun 8 s.d 12: Level 5, Tahun 9 s.d 12: Level 6, Tahun 11 s.d 13: Level 7, Tahun 13: Level 8. (Gambar 2).



Gambar 2. Years and Curriculum Levels

Pendidikan kejuruan di Selandia Baru berjalan berdasarkan sejarahnya yang dimulai pada Tahun 1874 telah didirikan sekolah industri untuk orang miskin yang terabaikan, antara Tahun 1902-1980: didirikan Sekolah Menengah Teknik, pada Tahun 1980-2000 : dilakukan inisiatif inisiasi/keunggulan lokal, tahun 2013: diterbitkanlah Jalur Pendidikan Kejuruan/Vokasi Jalur Pendidikan Vokasi Selandi Baru dibagi ke dalam 6 sektor prioritas :1) Sektor Layanan Sosial dan Masyarakat, 2) Sektor Meanufaktur dan Teknologi, 3) Sektor Konstruksi dan Infrastruktur, 4) Sektor Industri Kreatif, 5) Sektor Industri Utama dan 6) Sektor Industri Layanan. (Gambar 3).



Gambar 3. Jalur Pendidikan Vokasi Selandia Baru

2. Garis Besar Kurikulum Selandia Baru

Sejak dimunculkan pertama kali Kerangka Kurikulum Selandia Baru pada tahun 1993, nautilus (siput) menjadi familiar sebagai simbol dari kurikulum Selandia Baru. Pada dokumen kurikulum Selandia Baru saat ini bentuk dari siput perbaharui. Dalam kehidupan nyata, siput adalah binatang laut dengan kulit yang berbentuk spiral. Kulitnya terdiri dari 30 lapisan. Siput membuat lapisan baru secara berkelanjutan satu demi satu. Perkembangan seperti ini juga terjadi pada tumbuhan seperti bunga matahari, bunga kol, siklon dan juga galaksi kita. Menurut puisi dari seorang

fisikawan dan penulis; Oliver Wendell Holmes (1809-1994) bahwa kulit spiral dari siput adalah sebuah simbol dari perkembangan intelektual dan spiritual. Dia menyarankan agar orang-orang menumbuhkan kulit pelindung mereka dan membuangnya saat tidak diperlukan lagi: "sebuah pikiran akan dikembangkan oleh sebuah ide baru, tanpa merusak dimensi aslinya. Baru adalah revisi kurikulum yang merupakan hasil kerja dari tim yang berkomitmen untuk menjamin bahwa generasi muda memiliki kesempatan terbaik mereka dalam pendidikan. Kurikulum terdahulu diimplementasikan dari tahun 1992 adalah kurikulum pertama yang berbasiskan pada fokus luaran tamatan; yaitu serangkaian kurikulum yang mengatur apa yang kita inginkan dari peserta didik untuk mereka ketahui dan dapat dilakukan. Sejak dikeluarkannya kurikulum tersebut tidak ada perlambatan dalam perubahan sosial yang terjadi.

Populasi penduduk di Selandia Baru berkembang dengan sangat bervariasi demikian pula teknologi semakin kompleks. Sistem pendidikan harus dapat merespon tantangan-tantangan tersebut dari waktu ke waktu. Untuk alasan ini, sebuah revidi kurikulum dilaksanakan pada tahun 2000- 2002. Menindaklanjuti revidi ini, Kabinet menyetujui bahwa kurikulum nasional harus direvisi. Sejumlah kelompok melakukan sebuah proses pengembangan yang melibatkan uji coba di sekolah-sekolah, kelompok-kelompok tertentu, diskusi online, penelitian nasional dan internasional. Proses ini menghasilkan publikasi *The Selandia Baru Curriculum: Draft for Consultation 2006*. Kementerian Pendidikan menerima lebih dari 10.000 respon. Hal tersebut dianalisa dan diberikan pertimbangan kapan dokumen tersebut dapat dituliskan. Kurikulum Selandia baru adalah pernyataan yang jelas mengenai apa yang penting untuk dipertimbangkan dalam pendidikan. Hal tersebut dimulai dengan menetapkan sebuah visi mengenai pendidikan sepanjang hayat bagi generasi muda sebagai pembelajar yang percaya diri, kreatif, berhubungan dan secara aktif terlibat. Kurikulum tersebut termasuk sejumlah prinsip yang jelas yang mendasari pembuatan keputusan mengenai kurikulum. Kurikulum menetapkan nilai-nilai yang dikembangkan, dimodelkan dan dieksplorasi. Kurikulum tersebut memuat 5 kompetensi kunci yang merupakan aspek kritis untuk keberlanjutan pembelajaran dan partisipasi yang efektif dalam masyarakat yang menekankan pada penguatan pendidikan sepanjang hayat.

Kurikulum Selandia baru menekankan secara jelas setiap area pembelajaran mengenai bagaimana pembelajaran diatur. Sangkaian tujuan pencapaian telah direvisi secara hati-hati oleh tim akademik dan guru-guru untuk meyakinkan bahwa kurikulum yang ada terkini, relevan dan luarannya didefinisikan dengan baik untuk peserta didik. Area pembelajaran yang baru dalam kurikulum ini ada pembelajaran bahasa yang ditambahkan untuk mendorong peserta didik untuk berpartisipasi lebih aktif dalam keberagaman yang ada di Selandia Baru, masyarakat yang beragam dan komunitas global.

C. Manajemen Pembiayaan

Menurut pendapat Slamet P.H., istilah manajemen berbasis sekolah berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis berarti "berdasarkan pada" atau berfokus pada. Sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang bertugas memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik dan profesionalistik. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Dimana Mulyasa menjelaskan bahwa dalam manajemen pendidikan dikenal ada dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan sistem meningkatkan kinerja sekolah. yang terpenting bahwa Hakikat desentralisasi pendidikan adalah "apa dan kepada siapa" (what and to whom) dan bukan pada aturan-aturannya (regulation). Dalam tulisannya, A.D Gruaw menjelaskan tentang pengertian MBS adalah: A general definition is easy to produce: the transfer of decision-making power on management issues to the school level.⁷ MBS memberikan konsep kemudahan dalam proses operasional yaitu mentransfer kekuatan pengambilan keputusan tentang isu-isu strategis manajemen menuju level sekolah.

Dalam rangka implementasi MBS, management basie project menjelaskan definisi operasional MBS, sebagai berikut:

1. Dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) alokasi dana kepada sekolah menjadi lebih besar dan sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah sendiri.
2. Sekolah lebih bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, dan penggunaan fasilitas sekolah, termasuk pengadaan buku dan bahan belajar. Hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas.
3. Sekolah membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya dalam proses tersebut.
4. Kepala sekolah dan guru dapat bekerja lebih profesional dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolahnya.

Dari berbagai pendapat tentang pengertian dan konsep MBS di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen berbasis Ketika model MBS dipandang memiliki kelebihan dan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan, banyak kalangan berpendapat bahkan memberikan nada pesimis apakah MBS dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan perubahan kualitas pendidikan kearah yang lebih baik. Model MBS memiliki kesamaan karakteristik dengan organisasi profit. Interaksi antara lembaga yang bertujuan ekonomis (profit oriented) dengan lembaga yang bertujuan sosial (nonprofit oriented) telah terjadi cukup lama baik disadari atau tidak disadari. Salah satu ciri yang paling mendasar dari profit eriented organization adalah capaian kinerja yang diukur berdasarkan efisiensi dan efektivitas kerja. Sedangkan nonprofit oriented organization lebih berdasarkan pada tujuan-tujuan yang kurang terukur dan cenderung bersifat jangka panjang. Pada tahap interaksi tersebut nonprofit oriented organization menyadari pentingnya model capaian berdasarkan prinsip kinerja, produktivitas, kualitas, efisiensi dan efektifitas.

D. Manajemen sarana dan prasarana

Dalam hal ini Mulyasa mengatakan bahwa: "sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.¹¹ Manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SD SPK New Zealand School Jakarta memiliki beberapa cara yaitu dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran dan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran.

- a) Mengadakan ruang kelas yang inovatif dan kreatif yaitu kelas yang proses pembelajarannya sudah memanfaatkan teknologi informasi. Pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi bisa mendorong murid menjadi lebih aktif belajar.
- b) Mengadakan laboratorium komputer. Dengan adanya laboratorium peserta didik dapat melakukan pengujian yang didukung dengan alat- alat uji dan bahan uji. Laboratorium merupakan tempat praktik dan menguji suatu hal yang berkenaan dengan teori yang sedang dipelajari dan telah didapat atau dikuasainya.
- c) Pengadaan lapangan, dengan adanya fasilitas tersebut menjadikan peserta didik melakukan olahraga setiap harinya yang dapat menumbuhkan kesehatan jasmani.
- d) Pengadaan perpustakaan. Dengan adanya fasilitas tersebut menjadikan peserta didik tertarik untuk mengunjungi perpustakaan dan menanamkan cinta membaca.
- e) Pengadaan ruang alat-alat olahraga, dengan pengadaan alat-alat tersebut akan memperlancar pembelajaran olahraga.
- f) Pengadaan alat-alat tulis, alat-alat praktik kesenian, seperti pensil, penghapus, buku, alat-alat lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran.
- g) Pemeliharaan lingkungan sekolah dilakukan setiap hari oleh petugas kebersihan dan di setiap kelas maupun ruangan diberi tempat sampah. Setiap harinya peserta didik sebelum pulang melaksanakan piket kebersihan kelas.
- h) Peserta didik sebelum pulang dianjurkan untuk melakukan penataan kerapian perlengkapan kelas.

Dengan upaya-upaya di atas, diharapkan SD SPK New Zealand School Jakarta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajarannya, sehingga tahap demi tahap akan semakin baik, maju dan eksis serta menghasilkan output maupun outcome yang bermutu. Adanya peningkatan sarana dan prasarana tentunya tidak hanya sekedar peningkatan akan tetapi juga dapat digunakan dan dimanfaatkan seoptimal maupun sebaik mungkin dalam proses pembelajaran.

E. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Konsep *School-Based Management* (SBM), sebagaimana judul dalam buku di atas, di Indonesia lebih dikenal dengan istilah manajemen berbasis sekolah atau MBS. Konsep ini baru digulirkan di Indonesia pasca Gerakan Reformasi Mei 1998 yang mengakhiri sistem sentralistik dari pemerintah pusat. Pendidikan, sebagai salah satu bidang yang didelegasikan dari pemerintah pusat kepada daerah, merupakan hal yang mengiringi otonomi daerah yang diberlakukan. Pasca implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan mampu mengurangi cengkeraman pusat terhadap sekolah. Konsep MBS, sebenarnya memiliki berbagai konsekuensi saat sudah diimplementasikan dalam dunia pendidikan. MBS, dalam bidang kurikulum, mendorong setiap sekolah untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Setiap sekolah, berapapun jarak lokasinya dengan sekolah lain, diperbolehkan memiliki visi, misi dan program yang berbeda dengan sekolah yang lain. Namun, visi, misi dan program yang dirancang harus tetap dalam kerangka besar untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pada bidang pendanaan, implementasi MBS mendorong setiap sekolah untuk “semakin cerdas” dalam memperoleh sumber biaya. Kondisi ini dilatarbelakangi adanya pemahaman bahwa dunia pendidikan juga menjadi tanggung jawab masyarakat, bukan hanya pemerintah. Namun, konsistensi Indonesia untuk mengimplementasikan MBS patut dipertanyakan. Pada sekolah-sekolah negeri, independensi pembiayaan dari pemerintah masih belum diwujudkan, terlebih dalam membiayai rutin pendidik dan tenaga kependidikan. Pada sekolah swasta, terlebih sekolah dengan *networking* mumpuni dalam hal pembiayaan, kewajiban ini bukan menjadi sesuatu hal yang berat.

Secara global, meskipun sudah lebih dari 20 tahun otonomi pendidikan diberlakukan, konsep MBS di Indonesia belum mampu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Terdapat adanya empat pilar utama dalam mensukseskan implementasi MBS di Indonesia yang belum berjalan secara maksimal, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, kemandirian dan kualitas proses belajar mengajar. Dengan melihat realita tersebut, tidak mengherankan jika MBS di Indonesia masih berjalan di tempat. Partisipasi masyarakat dalam implementasi konsep MBS mutlak diperlukan, bahkan sebagai ruh dan substansi. Selain dalam hal pengelolaan, partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sekolah juga berperan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan komitmen kepada aksi, sehingga mereka mampu untuk meneliti nilai-nilai insani secara kritis dan menguji nilai-nilai mereka sendiri. Integrasi personal dari nilai-nilai etis dan religius yang mendorong orang berbuat sesuatu, jauh lebih penting daripada kemampuan menghapuskan fakta dan pendapat-pendapat dari orang lain. Partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS juga merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Masyarakat merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi sekolah, semua siswa yang berada di sekolah berasal dari masyarakat sekitar, siswa akan tinggal di sekitar sekolah sepanjang 24 jam. Masyarakat merupakan salah satu sumber pemasukan uang pemerintah, oleh karena itu masyarakat merupakan aset penting dalam pembangunan, termasuk dalam dunia pendidikan.

F. Isu-isu dalam pendidikan di islandia baru

Munculnya isu-isu baru sebagai konsekuensi logis dari menguatnya hubungan ketiga komponen tersebut, seperti hak partisipasi dan kompensasi politik yang mensejahterakan bagi warga negara, kebebasan pers bagi perwujudan demokrasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan sebagai prasyarat penciptaan clean government dan good governance, dan lain sebagainya. Mendasarkan pada pemikiran tersebut, perlu kiranya dikaji praktik politik dan peran media dalam pembangunan masyarakat sipil. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan keterkaitan antara politik dan media tersebut, dalam arti bagaimana politik tersebut diwujudkan, serta peran yang seharusnya dimainkan oleh institusi media dalam

perwujudan masyarakat sipil, masyarakat yang mandiri secara politik, ekonomi dan budaya dalam pencapaiannya menuju masyarakat yang lebih maju, adil dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Menetapkan agenda yakni merumuskan problem-problem masyarakat dan menyarankan solusi-solusi alternatifnya. Ini adalah proses terpenting dalam menentukan kebijaksanaan umum Kondisi-kondisi dalam masyarakat, yang tidak pernah dirumuskan sebagai problem, dan karena itu tidak pernah diberi usulan-usulan solusi, tidak akan pernah menjadi isu-isu politik. Di sisi lain, kondisi-kondisi dalam masyarakat yang dirumuskan sebagai problem akan menjadi isu kebijaksanaan. Pemerintah akan terpaksa untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil yakni nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, nilai-nilai kepercayaan dan tanggungjawab, dan nilai-nilai kerjasama dankolaborasi dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan di Finlandia. Hal ini agaknya bertentangan dengan pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia yakni yang mengutamakan persaingan, adanya tinggal kelas dalam sistem pendidikan nya. Negara Finlandia tidak menerapkan sistem tinggal kelasperangkingan dengan jam pelajaran 30 jam perminggu, mengedepankan metode *problem solving*, tidak membebani peserta didik dengan banyak tugas dan kualifikasi guru minimal S2 dengan kualifikasi peserta didik mengikuti pendidikan dasar minimal berusia 7 tahun, sedangkan Indonesia menerapkan sistem tinggal kelas dan perangkingan, beban belajar setiap minggu 40 jam/minggu, pembelajaran lebih banyak didalam kelas, pemberian hampir menjadi agenda rutin setiap tatap muka, dan kualifikasi guru minimal D4 dengan Kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 6 tahun (5,5 tahun disertai rekomendasi tertulis dari psikolog profesional).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan sebelumnya, maka dirumuskan saran yakni pemerintah hendaknya merumuskan kebijakan yang dapat sistem pendidikan negara lain yang telah terbukti berhasil dalam peningkatan pendidikan di negaranya, untuk peneliti selanjutnya agar merancang sebuah analisis komparatif sistem pendidikan yang ada pada negara Indonesia, negara berkembang, dan negara maju guna mencari formula sistem pendidikan yang paling tepat dengan karakteristik serta tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, perspektif politik dan media dalam upaya pembangunan civil society dapat terbentuk melalui model ruang publik Habermas. Dengan sistem politik yang terbuka, politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat akan mampu menciptakan sistem media yang bebas sebagai perwujudan demokrasi. Media untuk selanjutnya dapat menjalankan perannya secara fungsional dalam menunjang proses demokratisasi dengan memberikan ruang publik yang bebas pada masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat yang well informed, educated society berpeluang besar bagi penciptaan masyarakat sipil sebagaimana yang diharapkan tanpa harus vis a vis terhadap negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggoro, S. (2017). Keberhasilan Pendidikan Finlandia.
- Blazar, D., & Kraft, M. (2017). Teacher and Teaching Effects on Students' Attitudes and Behaviors. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 39(1), 146–170. <https://doi.org/DOI:10.3102/0162373716670260>
- Charron, N., Ph, D., Givens, T., Luedtke, A., Arregui, J., Creighton, M., ... Connell, K. O. (2013). Human Development Report 2015 Work for Human Development. *Public Health*, 27(6), 1–8. <https://doi.org/10.1177/0956247815583253>
- Finland, M. of E. (2015). Ministry of Education 2015.
- Finnish National Agency For Education. (2018). Education System: Equal Opportunities to High Quality Education.

- Gagnidze, A., & Maglakelidze, S. (2017). Competition on the Georgia Education Marketplace. *International Education Studies*, 10(6), 10–22.
- Goodill, C. (2017). An Analysis of the Educational System In Finland and the United States: A Case Study.
- Kasihadi, R. (2016). Optimalisasi Prestasi Peserta Didik Melalui Sistem Pendidikan yang Humanis: Suatu Perbandingan dengan Negara Maju. *Jurnal Widyatama*, 20(2), 145–151.
- Lauen, D, L., & Gaddis, S. (2016). Accountability Pressure, Academic Standards, and Educational Triage. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 38(1), 127–147.
- Liputan6.Com. (2014). Pendidikan di Finlandia Maju Berkat Ki Hajar Dewantara.
- Sazali. 2002. Muhammadiyah dan Masyarakat Madani; Independensi, Rasionalitas dan Pluralisme. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah. Jakarta
- Suryadi, Karim. (1999). Media Massa dan Sosialisasi Politik; Perspektif Teori Belajar Sosial. *Jurnal ISKI edisi Komunikasi Politik*. Vol. IV/ Oktober 1999.